

## DAMPAK PELARANGAN PENGGUNAAN CANTRANG TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI NELAYAN TEGAL

Hendrayana<sup>1)</sup>, Ninik Umi Hartanti<sup>2)</sup>

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pancasakti Tegal

email : hendraupstegal@gmail.com

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pancasakti Tegal

email : ni2kxp@yahoo.co.id

### *Abstract*

*The government regulations about cantrang inhibition utilization impact on the socio-economic conditions of Tegal fishermen. The aim of the research was to determine the cantrang inhibition utilization impact on the socio-economic conditions of Tegal fishermen. The descriptive method was applied in research. The interview method was applied in research to collected data. The data collected was fisherman income, fishing operation manajemen, fishing permit and fisherman activity. Cantrang inhibition utilization impact has a increasing of unemployment rate, change of fishing pattern, increasing of fish price and decreasing of fisheries industry.*

**Keyword :** *Cantrang, Fishing, Fisherman, Sosio – Ekonomi, Tegal*

### 1. PENDAHULUAN

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kawasan Pantai Utara Jawa. Kota Tegal memiliki topografi dataran rendah dengan ketinggian 1 – 7 m dari permukaan air laut. memiliki potensi sumberdaya perikanan laut yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjang dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan yang terletak di Kelurahan Tegalsari yang memudahkan akses nelayan dalam bidang penangkapan ikan (<http://www.tegalkota.go.id>).

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kawasan Pantai Utara Jawa yang memiliki luas 39,68 km<sup>2</sup> serta luas wilayah laut 12 mil dari darat seluas 87,6 km<sup>2</sup> dengan garis pantai sejauh 7,3 km. Kota Tegal merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian permukaan tanah 0-3 m di atas permukaan laut. Keberadaan Kota Tegal di wilayah pesisir memungkinkan untuk dilakukan beberapa kegiatan yang mengarah pada pengembangan sumberdaya kelautan perikanan seperti kegiatan budidaya perikanan dan perikanan (Profil Kota Tegal, 2016).

Menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011, produksi perikanan Kota Tegal mencapai 35.206,3 ton. Produksi perikanan pada tahun 2016 mengalami penurunan hampir 50% yaitu sebesar 17.343,17 ton (Profil Kota Tegal, 2016). Menurut Mulyani dan Hendrayana (2016) produktivitas alat tangkap cantrang pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 40,82% dibandingkan tahun 2015. Hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan untuk melakukan perubahan strategi penangkapan sumberdaya perikanan.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan penangkapan ini adalah dengan mengeluarkan Permen-KP Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Faktanya, pelarangan ini akan berdampak cukup besar bagi nelayan Kota Tegal yang memanfaatkan cantrang sebagai alat utama dalam menangkap ikan terutama berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi nelayan. Kajian

ini disusun dengan tujuan mengetahui dampak larangan penggunaan cantrang terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan Kota Tegal.

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Perkembangan Teknologi Perikanan Kota Tegal

Kota Tegal merupakan wilayah Pantai Utara Jawa yang memiliki potensi sumberdaya perikanan melimpah. Potensi perikanan ini dimanfaatkan oleh sebagian penduduk Kota Tegal sebagai sumber mata pencaharian yaitu sebagai nelayan. Perkembangan kegiatan perikanan yang dilakukan oleh nelayan dimulai dari kegiatan perikanan dengan metode tradisional hingga saat ini menggunakan teknologi modern seperti penggunaan radar, GPS dan fish finder.

Perkembangan teknologi menjadi solusi meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan. Penemuan alat tangkap ikan yang efektif dalam sisi kuantitas dan efektifitas penangkapan serta meningkatnya kebutuhan mendorong kegiatan penangkapan semakin intens. Peningkatan jumlah kapal, modernisasi alat tangkap seperti *trawl* atau *cantrang* yang dikembangkan oleh masyarakat Kota Tegal ternyata mampu meningkatkan perekonomian nelayan. Cantrang merupakan contoh alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) yang dominan digunakan oleh nelayan Kota Tegal. Dampak dari *overcapacity* kapal dan alat tangkap ini tidak berdampak secara langsung, namun secara bertahap. Hal tersebut dapat dilihat adanya penurunan hasil tangkapan ikan dari tahun 2010 (20.323,8 ton) ke tahun 2015 (17.343,17 ton).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan alat tangkap dilakukan dengan mengeluarkan Permen-KP Nomor 2 tahun 2015 belum memecahkan solusi permasalahan alat tangkap di Kota Tegal yang disebabkan karena ketergantungan nelayan dan industri perikanan di Kota Tersebut. Pengelolaan sumberdaya perikanan hendaknya dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan (Syahrul,2012). Pengelolaan perikanan yang bersifat top down melalui peraturan perundangan biasanya akan berdampak besar terhadap masyarakat seperti perubahan perilaku sosial dan ekonomi masyarakat.

### Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumberdaya perikanan melimpah. Potensi lestari sumberdaya perikanan tangkap mencapai 6,5 juta ton/tahun dengan potensi penangkapan sebesar 5,2 juta ton/tahun. Menurut FAO (2014) dalam Bappenas (2014), Indonesia berada pada ranking 2 sebagai produsen perikanan tangkap dunia. Hal ini menunjukkan bahwa potensi perikanan di Indonesia sangat besar yang dapat digunakan sebagai modal dalam kegiatan pembangunan nasional (Bappenas, 2014).

Keberadaan sumberdaya perikanan yang melimpah mendorong berkembangnya sektor perikanan di Indonesia. Karakteristik sumberdaya perikanan adalah bersifat *open acces* atau terbuka. Karakteristik ini menyebabkan perkembangan kegiatan perikanan yang mengarah pada pemanfaatan tidak terbatas. Pemanfaatan sumberdaya yang bersifat *open acces* dikhawatirkan menyebabkan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berlebihan. Asumsi yang timbul dalam masyarakat adalah masyarakat memiliki hak penuh dalam kegiatan penangkapan, hal ini diperparah dengan kepercayaan masyarakat bahwa sumberdaya perikanan akan senantiasa ada dan tidak akan pernah punah. Ikan pada hakikatnya merupakan sumberdaya alam terbarukan yang dapat berkembang biak yang selalu tersedia di alam (Widodo dan Suadi, 2006).

Perkembangan eksplorasi perikanan dengan modernisasi teknologi telah mengarah pada konsep ekonomi, dimana semakin besar usaha maka hasil yang diperoleh akan semakin besar. Konsep ini jika dilakukan tanpa memperhatikan konsep ramah lingkungan akan berdampak pada degradasi sumberdaya perikanan. Pemanfaatan sumberdaya ikan secara berlebihan akan berdampak pada penurunan stok ikan. Terkait hal tersebut perlu adanya

pendekatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu dengan berpedoman pada sinergisitas antara lingkup ekonomi, konservasi/biologi yang dilakukan secara sinergis oleh masyarakat yang dikenal dengan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis partisipasi masyarakat.

Pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan berpedoman pada kesadaran lingkungan. Konsep kesadaran lingkungan adalah partisipasif yang berarti pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Hal ini dikarenakan masyarakat atau nelayan adalah subjek utama dalam kegiatan pengelolaan kegiatan perikanan berkelanjutan. Perikanan berkelanjutan bukan berarti menuntut pembatasan nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan, namun kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan konsep lestari yang artinya nelayan menangkap ikan sesuai dengan kebutuhan pasar dan dengan mempertimbangkan keselamatan lingkungan. Pola pembatasan kegiatan penangkapan nyatanya memberi dampak pada gejolak sosial ekonomi nelayan seperti berkurangnya industri perikanan, berbagai aksi demo nelayan di berbagai daerah hingga berujung pada perusakan fasilitas negara oleh nelayan.

### 3. METODE PENELITIAN

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada nelayan dan stakeholder terkait kegiatan perikanan yang menyangkut data pendapatan nelayan, manajemen operasi penangkapan ikan, perizinan penangkapan dan aktifitas kegiatan nelayan (Data Primer). Data penunjang lain berupa data hasil tangkapan ikan tahun 2012 – 2017, kondisi nelayan dan kondisi sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan yang diperoleh dari instansi terkait, seperti Kantor PPP Tegalsari, Kota Tegal dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menelaah secara mendalam suatu masalah pada waktu dan tempat tertentu, sehingga memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi secara lokal dan hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk tempat dan waktu yang berbeda (Hadi, 2000). Selain itu, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *Sample Survey Method* yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencatat sebagian kecil populasi tetapi hasilnya diharapkan dapat menggambarkan sifat populasi yang diselidiki. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi guna mengumpulkan data lapangan melalui kegiatan wawancara dengan nelayan dilakukan untuk mengumpulkan data pendapatan nelayan, manajemen operasi penangkapan ikan, perizinan penangkapan dan aktifitas kegiatan nelayan.

### 4. HASIL PENELITIAN

#### Kondisi Perikanan Kota Tegal

Kota Tegal merupakan salah satu pusat kegiatan perikanan di wilayah Pantura Bagian Barat. Hal ini dipertegas oleh penetapan Tegal sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap di Pantura Barat oleh Presiden Megawati pada tahun 2004. Fungsi ini didukung oleh keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari sebagai salah satu pelabuhan perikanan terbesar di daerah tersebut yang digunakan oleh nelayan sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap.

Sebagai pusat kegiatan perikanan di Pantura Bagian Barat, Kota Tegal terutama di daerah Tegalsari menjadi pusat industri perikanan. Kegiatan industri perikanan ini berupa industri perikanan tangkap seperti pembuatan alat tangkap hingga galangan kapal, industri olahan seperti olahan ikan asap, ikan asin, aneka olahan ikan seperti nugget, bakso, siomay dan lain sebagainya. Kegiatan sektor perikanan ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 87.577 orang.

Kesediaan bahan baku industri perikanan terutama industri olahan berasal dari hasil tangkapan kapal cantrang. Alat tangkap ini merupakan alat tangkap ikan yang dianggap paling efektif. Kapal cantrang merupakan kapal dengan berat diatas 30 GT yang dioperasikan dengan sistem ditarik yang ditebar hingga dasar perairan. Hasil tangkapan utama cantrang

merupakan ikan demersal atau hewan dasar perairan seperti ikan kakap dan bawal. Meskipun demikian alat tangkap ini berdampak negatif pada penurunan populasi ikan akibat kerusakan dasar perairan yang ditimbulkan dari penarikan alat tersebut sehingga untuk mendapatkan ikan, nelayan harus menangkap lebih jauh.

Daerah penangkapan sumberdaya ikan di Kota Tegal saat ini banyak dilakukan di perairan sekitar Kepulauan Karimunjawa Jawa Tengah. Jarak zona penangkapan sumberdaya ikan semakin jauh dibandingkan 15 tahun lalu, dimana dalam zona 3 km kegiatan penangkapan masih dapat dilakukan. Menurut Indrayani *et al.*, (2012) daerah penangkapan bersifat dinamis mengikuti perubahan kondisi lingkungan. Perubahan daerah penangkapan ikan dapat disebabkan oleh penangkapan ikan (Atmaja, 2013) sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permen-KP Nomor 2 tahun 2015 tentang penggunaan pukat seperti cantrang merupakan langkah konservatif pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan. Peraturan ini ternyata berdampak cukup besar bagi nelayan Kota Tegal terutama berdampak pada kondisi sosial ekonomi nelayan.

### **Kondisi Sosial – Ekonomi Pelarangan Cantrang Terhadap Nelayan Kota Tegal**

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pendapatan rata-rata nelayan kecil Kota Tegal per trip pada tahun 2017 sebesar Rp. 35.000,00 - 50.000,00/hari meningkat dibandingkan pendapatan nelayan pada tahun 2015 – 2016 yaitu sebesar Rp. 25.000,00 – 30.000,00/ hari, sedangkan ABK kapal besar mendapatkan penghasilan kotor sebesar Rp. 3.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00/ bulan menurun menjadi Rp. 3.000.000,00 – 4.000.000,00/ bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pelarangan alat tangkap berdampak pada pendapatan nelayan kecil semakin meningkat dan pendapatan nelayan kapal besar semakin menurun. Penurunan pendapatan nelayan besar dengan alat tangkap cantrang yang mengalami penurunan pendapatan akibat biaya operasional kapal yang semakin tinggi dan penurunan hasil tangkapan ikan. Hasil tangkapan yang banyak ditangkap oleh nelayan adalah ikan Swangi (12%), cumi-cumi (12%) dan ikan Kurisi (10%) (PPP Tegalsari, 2015).

Penurunan hasil tangkapan nelayan berdampak pada meningkatnya harga komoditas perikanan. Harga rata-rata ikan tahun 2014 (tahun sebelum diberlakukannya Permen KP Nomor 2) sebesar Rp. 9.859,00, pada tahun 2017 meningkat sebanyak Rp.11.625,00 menjadi 21.484,00 (PPP Tegalsari, 2017). Perubahan harga ini disebabkan karena pada tahun 2015-2017 terjadi pembatasan operasi kapal cantrang. Kapal cantrang yang beroperasi pun harus melewati perizinan yang lebih ketat terutama penyesuaian ukuran kapal, dampaknya banyak industri kekurangan bahan baku hingga tidak mampu beroperasi.

Menurunnya kegiatan industri menyebabkan meningkatnya pengangguran di wilayah pesisir Kota Tegal. Pada Bulan Desember tahun 2015 sebanyak 90% nelayan menjadi pengangguran akibat kapal tidak beroperasi dan 90% pekerja wanita kehilangan pekerjaan. Sebesar 60% pekerja tersebut masih belum bekerja dan menunggu kebijakan pemerintah untuk mencabut larangan penggunaan cantrang sedangkan 40% beralih profesi ke bidang kerja lain seperti buruh pabrik, membuka usaha dan kerja serabutan.

Berdasarkan dampak sosial ekonomi tersebut, semestinya aturan tersebut tidak bersifat mutlak harus segera dilaksanakan. Pemerintah sebaiknya menerbitkan peraturan diikuti oleh solusi alternatif seperti adanya alat tangkap substitusi yang memiliki efektifitas tidak jauh dari alat tangkap cantrang. Solusi lain seperti memberi waktu bagi nelayan melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan alat tangkap ramah lingkungan serta penanaman tentang kearifan lokal pada masyarakat.

Kearifan lokal merupakan tradisi yang tumbuh dimasyarakat yang nilai kebenarannya diyakini oleh masyarakat dan memiliki nilai pelestarian ekosistem (Utina, 2012). Kearifan lokal dianggap sebagai pendekatan yang memiliki dampak lebih baik dibandingkan dengan aturan lain yang bersifat mengingot. Hal ini disebabkan karena kearifan lokal berasal dari masyarakat, aturan dan pelanggaran diatur dalam sistem sosial, sehingga masyarakat yang melanggar akan mendapatkan sanksi sosial. Paradigma sanksi sosial dalam masyarakat

Indonesia dirasa lebih berat dibandingkan dengan sanksi lain. Dengan demikian, perubahan adaptasi masyarakat Kota Tegal hendaknya dilandasi oleh kearifan lokal masyarakat setempat sehingga kegiatan penangkapan ikan terlaksana secara teratur dan dilakukan dalam sistem berkelanjutan.

## 5. SIMPULAN

Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi (1) kondisi sosial yaitu meningkatnya tingkat pengangguran dan perubahan lapangan pekerjaan nelayan; (2) kondisi ekonomi yaitu menurunnya penghasilan nelayan dan menurunnya jumlah industri perikanan.

## 6. REFERENSI

- Atmaja, S.B., Perkembangan Perikanan Cumi-cumi di Sentra Pendaratan Ikan Utara Pulau Jawa, *J.Lit.Perikanan.Ind.* 19, (2013)
- Bappenas., *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Jakarta, 2014
- Hadi, S., *Metodologi Research Jilid 3*, Andi, Yogyakarta, 2000
- Mulyani, S dan Hendrayana., Pola Adaptasi Nelayan Terhadap Penurunan Hasil Tangkapan Ikan Berbasis Pendekatan Kearifan Lokal di Kota Tegal (*Laporan penelitian*), 2016
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015
- Sistem Informasi Pembangunan Kota Tegal Tahun 2016
- Syahrul., Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pelagis Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Di Perairan Teluk Tomini, *J. Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2, (2012)
- Utina, R., Kecerdasan Ekologis Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo, Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia, *Prosiding* (21), 2012
- Widodo, J dan Suadi., *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta, (2006)
- <http://www.tegalkota.go.id>